**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Globalisasi yang ditandai dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi transparan, seolah-olah menjadi satu kampung tanpa mengenal batas negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yaitu struktur global yang pada gilirannya akan memperbaiki struktur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, serta akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat, situasi tersebut membawa perbaikan dan perubahan yang sangat cepat.

Seiring dengan perkembangan keadaan dan perubahan yang terjadi sangat cepat itu, keberadaan sistem informasi yang andal menjadi kebutuhan mutlak suatu bangsa untuk memperlancar pencapaian suatu sasaran dan tujuan. Kemampuan suatu sistem informasi untuk menyediakan dan menggunakan informasi secara efektif dan produktif telah dianggap sebagai salah satu indikator kemajuan suatu bangsa.

Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dapat menimbulkan suatu perubahan. Perubahan ini juga telah merubah cara pandang setiap orang dalam melakukan berbagai kegiatan salah satunya adalah pada kegiatan instansi pemerintah. Peran informasi di dalam organisasi dapat diibaratkan sebagai darah pada tubuh manusia. Tanpa adanya aliran informasi yang sehat, organisasi akan mati.

Kemajuan teknologi informasi dalam mendukung berbagai kegiatan instansi pemerintah, termasuk pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Banyaknya data yang dikelola dan perlunya penyampaian informasi yang cepat dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan menjadikan teknologi informasi sebagai media yang dianggap mampu dan handal untuk membantu dalam pengelolaan data dan penyajian informasi yang cepat, mudah dan akurat. Penerapan teknologi informasi ini diantaranya adalah penggunaan sistem informasi kependudukan. Sistem informasi kependudukan adalah salah satu jenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data pencatatan biodata penduduk pada salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan (Darwis, 2008).

Peraturan perundangan tentang administrasi kependudukan memberikan ketentuan tentang kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan segala sesuatu mengenai peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, baik itu berupa lahir, kawin, cerai, pindah, datang dan mati sehingga kita semua tahu dengan jelas berapa jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah kita.Tertib administrasi kependudukan serta adanya tuntutan data yang akurat didukung oleh proses pelayanan yang tepat dan cepat saat ini menjadi suatu kebutuhan. Untuk mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan data penduduk yang berbasis teknologi informasi, pemerintah dalam hal ini telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama sistem informasi administrasi kependudukan atau disingkat SIAK.

Sistem informasi administrasi kependudukan pada hakekatnya merupakan upaya tertib dokumen kependudukan atau tertib administrasi kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tetapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui atau mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki manfaat bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik dan menjadi urusan wajib (Erza, 2009).

Dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan, penerapan teknologi (basis data) sangat penting untuk menjawab keamanan dan kecepatan dalam proses perekaman, pengiriman/komunikasi data, penyimpanan serta pendayagunaan data individu penduduk. Dengan prinsip tersebut, SIAK dirancang, dibangun dan dikembangkan untuk mampu menyelenggarakan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional sebagai nomor identitas tunggal yang ditampilkan pada setiap dokumen kependudukan dan sebagai kunci akses untuk verifikasi data diri maupun identifikasi jati diri seseorang yang sangat berguna di dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti perkembangan teknologi, untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan suatu sistem informasi administrasi kependudukan maka pengolahan data akan lebih mudah dan efisien. Kita bisa mengolah data-data yang bersangkutan dengan pengurusan kependudukan di suatu daerah.

Di dalam Keppres nomor 88 tahun 2004 pasal 1 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan disebutkan sistem informasi administrasi kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. Selain itu sistem informasi administrasi kependudukan juga memberikan keamanan. Keamanan ini bermakna ganda, yaitu bagi penduduk atau pemegang dokumen dapat memberikan rasa aman, nyaman, kepastian hukum (perlindungan dan pengakuan negara atau pemerintah) atas data informasi status kependudukan atau peristiwa vital yang tertera dalam dokumen, sedangkan bagi negara/pemerintah, dokumen kependudukan yang terjamin keasliannya dan valid data informasi di dalamnya dapat berfungsi mengendalikan penduduk untuk kepentingan nasional, serta bagi penyelenggara pelayanan publik dapat membantu mendukung terwujudnya pelayanan yang efisien dan efektif.

Program SIAK ini  merupakan pengelolaan administrasi kependudukan khusus untuk kartu keluarga dan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan, sesuai pasal 59 ayat (3) UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan  Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah. Sistem informasi layanan administrasi kependudukan berfungsi sebagai alat bantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dalam menyelenggarakan layanan kependudukan.

Di Indonesia instansi pemerintah yang menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Begitu juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yang menangani segala sesuatu mengenai peristiwa kependudukan. Peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan implikasinya atau pengaruhnya terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status orang asing dari status kunjungan menjadi tinggal terbatas atau dari status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang juga tempat dimana penduduk melaporkan peristiwa-peristiwa penting di dalam hidupnya yakni kejadian yang di alami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.

Salah satu yang termasuk ke dalam peristiwa kependudukan adalah di dalam penerbitan atau pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang merupakan suatu hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap penduduk di Indonesia. KTP berisi keterangan jati diri penduduk yang menjelaskan tentang nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, alamat, golongan darah dan agama. Dengan adanya KTP sebagai alat identitas seseorang ataupun alat bukti sah yang dapat mempermudah penduduk di dalam mengurus proses pelayanan lainnya. Selain itu, penduduk wajib memiliki KK untuk kejelasan hubungan dan susunan sekelompok penduduk yang tinggal bersama dan membentuk satu kesatuan keluarga (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, 2008).

Melalui program SIAK, setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di Kabupaten Serang dicatat dan didaftarkan dalam suatu *database* dan diberi NIK yang unik dan berlaku seumur hidup,  sehingga semua penduduk Kabupaten Serang tercatat, tidak terjadi duplikasi data, dan kepemikian KTP ganda. Di samping itu, data SIAK selain diperuntukan untuk pelayanan administrasi kependudukan, juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perencananan dan pembangunan bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh SKPD Kabupaten Serang yang membutuhkan data berbasis kependudukan (www.[disdukcapil](http://disdukcapil-serang.com)-serang.com, 2009).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang sebelum adanya SIAK menggunakan sistem informasi kependudukan yang disebut SIMDUK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). SIMDUK adalah suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Dimana SIMDUK merupakan sistem awal pengolahan data kependudukan yang dikembangkan menjadi SIAK. Adapun perbandingan antara SIMDUK dengan SIAK, antara lain :

Tabel 1.1

Perbandingan SIMDUK dan SIAK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SIMDUK** | **SIAK** |
| Database kependudukan | Tidak terpusat, berada pada setiap kecamatan | Terpusat di Dinas Kependudukan |
| Kegiatan Pelayanan | Pelayanan KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, dan Registrasi Penduduk | Pelayanan KTP, KK, dan Registrasi Penduduk |
| Warna Foto KTP | Dibebaskan untuk tahun genap atau ganjil | Tahun genap berwarna biru, dan tahun ganjil berwarna merah |
| Jangka Waktu KTP | Tiga tahun | Lima tahun |
| KTP ganda | Ada kemungkinan penduduk memiliki KTP ganda | Tidak akan ada lagi penduduk yang memiliki KTP ganda |
| Tanda Tangan di KTP | Tanda Tangan Camat | Tanda Tangan Kepala Dinas Kependudukan |
| Dasar Hukum | Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka SIMDUK | UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan |
| Tujuan Pembangunan Sistem | Memberikan pelayanan kepada masyarakat | Mencapai tertib administrasi kependudukan |
| Nomor Induk Kependudukan (NIK) | NIK dapat berubah-ubah | NIK Nasional dan tidak berubah-ubah |
| Desain KTP | Data pribadi penduduk berada di depan KTP | Data pribadi penduduk berada di belakang KTP |
| Jangka Waktu Pembuatan KTP/KK | 1 hari | 3 sampai 7 hari |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2010*

Beranjak dari itu semua di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dalam penerapan sistem informasi administrasi kependudukan, berdasarkan hasil observasi awal peneliti masih ditemukan beberapa permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. Pertama, di dalam penerapan SIAK yang seharusnya seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang dapat *online* dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, guna dapat mempermudah para pegawai di setiap Kecamatan dalam menangani pelayanan KTP dan KK, akan tetapi karena keterbatasan anggaran maka hanya empat Kecamatan yang dapat *online* dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Fitri selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, keterbatasan anggaran tersebut dikarenakan pihak dinas sudah mengajukan jumlah dana yang dibutuhkan yakni 4 milyar rupiah agar seluruh kecamatan dapat *online*, akan tetapi dari pihak Pemda hanya memberikan 347 juta rupiah kepada pihak dinas. Disamping itu, pihak dinas sudah mempresentasikan dan sudah melakukan studi banding dengan Surabaya yang sudah *online* 22 kecamatannya akan tetapi pihak Pemda tetap hanya memberikan dana 347 juta rupiah yang hanya cukup untuk empat kecamatan saja. Hal tersebut disebabkan karena disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah, dimana Pemda memberikan dana kurang dari yang dibutuhkan agar penerapan SIAK berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, hanya empat kecamatan yang *online* dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

Empat kecamatan yang terkoneksi *online* yakni Kecamatan Cikande, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Baros dan Kecamatan Kramatwatu. Keempat kecamatan tersebut dinilai strategis letak dan tempatnya dibandingkan kecamatan lainnya sehingga keempat kecamatan tersebut yang didahulukan untuk dipasang peralatan komunikasi seperti *tower* (menara penghubung jaringan) dan *router* (peralatan yang berfungsi untuk menghubungkan banyak LAN yang sejenis) agar dapat *online* dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

Penerapan SIAK di Kabupaten Serang berbeda dengan penerapan SIAK di Kota Cilegon. Di Kota Cilegon penerapan SIAK sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan yakni seluruh kecamatan di Kota Cilegon sebanyak delapan kecamatan sudah *online* dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon sehingga dapat mempermudah setiap kecamatan untuk melayani penerbitan KTP maupun KK. Kabupaten Serang baru empat kecamatan yg terkoneksi *online* dengan dinas, kecamatan-kecamatan lainnya yang tidak *online* datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang guna menerbitkan KTP maupun KK dengan jadwal kunjungan kecamatan yang berbeda-beda setiap harinya.

Tabel 1.2

Jadwal Kunjungan Operator Kecamatan Se-Kabupaten Serang

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SENIN** | **SELASA** | **RABU** | **KAMIS** | **JUMAT** |
| Pamarayan | Bandung | Kibin | Cinangka | Dibebaskan untuk Kecamatan manapun |
| Tanara | Waringin Kurung | Padarincang | Anyar |
| Tunjung Teja | Ciruas | Gunung Sari | Carenang |
| Bojonegara | Pontang | Pabuaran | Binuang |
| Petir | Ciomas | Kopo | Pulo Ampel |
| Mancak | Tirtayasa | Jawilan | Cikeusal |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2009*

Dengan adanya jadwal kunjungan di setiap kecamatan yang berbeda-beda dapat menghambat proses pelayanan kepada masyarakat, seperti kita ketahui masyarakat yang ingin membuat KTP ataupun KK yang seharusnya dapat langsung ditangani oleh setiap kecamatan tanpa menunggu terlalu lama, akan tetapi dengan tidak *online*nya kecamatan tersebut menjadi hambatan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimana para pegawai kecamatan harus datang terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk meng*input* data penduduk dengan membawa blangko-blangko untuk pembuatan KTP dan KK dari kecamatan masing-masing karena proses pembuatan KTP maupun KK terletak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut. Akan tetapi apabila penduduk dalam keadaan darurat ingin segera membuat KTP atau KK, dapat langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengurus penerbitan KTP maupun KK agar prosesnya tidak memakan waktu lama dengan membawa blangko dari setiap kecamatan masing-masing.

Dalam hal ini dikarenakan tidak *online*nya kecamatan-kecamatan tertentu di Kabupaten Serang dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, sehingga membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat karena waktu yang cukup lama, yakni kurang lebih satu minggu di dalam pembuatan KTP maupun KK dari yang seharusnya hanya satu hari di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun jumlah penerbitan KTP dan KK se-Kabupaten Serang, antara lain:

Tabel 1.3

Penerbitan KTP dan KK Se-Kabupaten Serang

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KECAMATAN** | **TAHUN 2009** | | | |
| **Jumlah KK** | **Jumlah Wajib KTP** | **Jmlh Yg Telah Memiliki KTP** | **Jmlh Yg Blm Memiliki KTP** |
| 1 | Kramatwatu | 17.337 | 56.932 | 54.851 | 2.081 |
| 2 | Waringin Kurung | 10.552 | 33.766 | 18.415 | 15.351 |
| 3 | Bojonegara | 97.99 | 27.149 | 24.450 | 2.699 |
| 4 | Pulo Ampel | 9.265 | 24.476 | 16.394 | 8.082 |
| 5 | Ciruas | 17.046 | 49.752 | 30.071 | 19.681 |
| 6 | Kragilan | 16.770 | 59.190 | 55.910 | 3.280 |
| 7 | Pontang | 13.345 | 38.172 | 32.034 | 6.138 |
| 8 | Tirtayasa | 9.389 | 28.595 | 16.950 | 11.645 |
| 9 | Tanara | 9.488 | 25.474 | 23.153 | 2.321 |
| 10 | Cikande | 22.674 | 54.823 | 45.646 | 9.177 |
| 11 | Kibin | 15.066 | 35.083 | 24.561 | 10.522 |
| 12 | Carenang | 10.966 | 29.681 | 18.676 | 11.005 |
| 13 | Binuang | 7.365 | 19.252 | 16.722 | 2.530 |
| 14 | Petir | 19.910 | 56.342 | 31.552 | 24.790 |
| 15 | Tunjung Teja | 9.116 | 29.586 | 24.892 | 4.694 |
| 16 | Baros | 10.688 | 31.525 | 19.601 | 11.924 |
| 17 | Cikeusal | 17.228 | 44.140 | 22.583 | 21.557 |
| 18 | Pamarayan | 12.385 | 34.112 | 24.137 | 9.975 |
| 19 | Kopo | 10.567 | 31.129 | 19.818 | 11.311 |
| 20 | Jawilan | 13.591 | 30.775 | 28.561 | 2.214 |
| 21 | Ciomas | 8.655 | 24.498 | 18.346 | 6.152 |
| 22 | Pabuaran | 7.884 | 18.718 | 14.244 | 4.474 |
| 23 | Padarincang | 14.846 | 41.691 | 22.788 | 18.903 |
| 24 | Anyar | 12.537 | 40.346 | 28.462 | 11.884 |
| 25 | Cinangka | 13.004 | 34.891 | 20.371 | 14.520 |
| 26 | Mancak | 10.766 | 26.348 | 22.024 | 4.324 |
| 27 | Gunung Sari | 4.663 | 12.049 | 7.230 | 4.819 |
| 28 | Bandung | 7.486 | 18.745 | 15.168 | 3.577 |
| JUMLAH | | 342.388 | 957.240 | 697.610 | 259.630 |

*Sumber : Laporan Registrasi Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2009*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selain penerbitan KTP dan KK terdapat pula ketidaktercapainya target dari jumlah wajib KTP di tahun 2009 yakni 259.630 orang penduduk yang belum memiliki KTP yang seharusnya penduduk tersebut sudah harus memiliki KTP. Hal ini dikarenakan masih ada penduduk yang beranggapan bahwa memiliki KTP itu tidak terlalu penting ataupun dapat dikatakan kurangnya kesadaran akan pentingnya KTP serta ketidakpedulian penduduk terhadap kepemilikan KTP itu sendiri.

Permasalahan yang kedua di dalam mengimplementasikan sistem informasi administrasi kependudukan berkaitan dengan kurangnya sarana yang menunjang kelancaran sistem informasi administrasi kependudukan yaitu alat yang dipergunakan untuk *input* data, proses data serta *output* data yakni komputer. Komputer yang merupakan sarana penunjang kelancaran proses sistem informasi administrasi kependudukan yang dipergunakan oleh setiap kecamatan untuk meng*input* data penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya ada enam komputer yang disediakan, sehingga tercipta adanya jadwal kunjungan operator kecamatan setiap harinya.

Hal tersebut yang membuat proses penerbitan KTP dan KK memakan waktu lama. Dikhawatirkan apabila komputer tersebut sedang mengalami kerusakaan atau kendala lainnya dapat menghambat proses sistem informasi administrasi kependudukan, karena komputer merupakan media utama untuk melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan. Jika setiap kecamatan tersedia satu komputer masing-masing dan tidak adanya jadwal kunjungan operator kecamatan setiap harinya, maka penerbitan KTP maupun KK tidak akan membutuhkan waktu lama. Karena kegiatan setiap kecamatan yang datang ke Dinas hanya untuk membuat KTP maupun KK untuk warga di setiap kecamatannya, dimana waktu yang dibutuhkan kurang lebih dari pagi hari hingga sore hari. Tercapainya atau lancarnya suatu kegiatan/pekerjaan di suatu instansi perlu didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarananya itu sendiri. Karena hal itu dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Permasalahan yang ketiga, penerapan SIAK *online* untuk kecamatan-kecamatan yang *online* dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang sering mengalami gangguan teknis seperti apabila cuaca buruk akan mempengaruhi sinyal yang menghubungkan antara kecamatan dengan dinas, sehingga dapat mengganggu proses penerapan SIAK di kecamatan tersebut. Pada akhir bulan Desember 2009, Kecamatan Kragilan peralatan komunikasinya seperti *tower*, *router* yang menghubungkan kecamatan dengan dinas mengalami kerusakan karena terkena petir akibat cuaca yang sangat buruk. Dimana Kecamatan Kragilan merupakan induk untuk jaringan Kecamatan Cikande, sehingga membuat Kecamatan Cikande tidak dapat mengoperasikan SIAK juga. Hal ini mengakibatkan Kecamatan Kragilan dan Cikande tidak dapat *online* untuk sementara waktu, sampai akhir Maret 2010 kerusakan yang terjadi belum juga diperbaiki, sehingga membuat Kecamatan Kragilan dan Cikande harus datang ke dinas untuk melakukan penerbitan KTP maupun KK. Akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2010 Kecamatan Kragilan dan Cikande sudah dapat dioperasikan kembali aplikasi SIAK.

Permasalahan keempat terletak pada tanggungjawab operator SIAK atau pegawai di setiap Kecamatan baik yang *online* maupun yang tidak *online*. Operator-operator SIAK yang meng*input* data, memproses data serta menerbitkan KTP dan KK sering mengesampingkan perlengkapan persyaratan di dalam pembuatan KTP maupun KK. Persyaratan masyarakat yang tidak lengkap seharusnya tidak dilayani untuk diterbitkan atau dibuatkan KTP maupun KK sebelum masyarakat tersebut dapat melengkapi persyaratan yang ada. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada operator-operator SIAK yang melanggar hal tersebut, sehingga dapat dikatakan kurangnya tanggungjawab pegawai atau operator SIAK dalam hal kelengkapan persyaratan di dalam pembuatan KTP maupun KK.

Permasalahan terakhir yang dapat menghambat proses sistem informasi administrasi kependudukan adalah minimnya keterampilan pegawai dalam memahami dan mengetahui lebih jauh mengenai teknologi khususnya komputer yang merupakan modal utama dalam melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan. Dalam hal ini, hanya ada dua pegawai yang memiliki memampuan teknisi yakni yang mengerti, memahami dan mengetahui lebih dalam mengenai sistem dari komputer itu sendiri yaitu program SIAK tersebut. Teknisi tersebut merangkap pula sebagai operator SIAK. Operator SIAK hanya dapat mengoperasikan program SIAK, akan tetapi tidak memahami apabila terjadi kerusakan pada komputer. Operator SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang adalah seluruh pegawai di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yakni sebanyak sembilan orang serta pegawai Kecamatan di Kabupaten Serang yakni satu orang di setiap Kecamatan.

Dapat dikatakan teknisi sistem informasi administrasi kependudukan yang cenderung terbatas sehingga dapat menghambat pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan itu sendiri apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada program SIAK ataupun pada komputer itu sendiri. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada era globalisasi seperti sekarang ini, kebutuhan akan IPTEK semakin dirasa penting. Informasi dan teknologi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Informasi dapat diperoleh dari teknologi canggih seperti komputer.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai **“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang”.**

* 1. **Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**
     1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini perlu adanya identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada lokasi penelitian, dari hasil studi pendahuluan peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran untuk memasang peralatan komunikasi agar seluruh Kecamatan di Kabupaten Serang dapat *online* dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.
2. Kurangnya sarana yang menunjang kelancaran sistem informasi administrasi kependudukan yakni komputer dan peralatan komunikasi lainnya.
3. Kurangnya tanggungjawab pegawai atau operator SIAK di dalam memenuhi kelengkapan persyaratan pembuatan KTP mapun KK yang merupakan bagian dari SIAK itu sendiri.
4. Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini para pegawai yang memiliki memampuan teknisi relatif terbatas dalam pemahaman terhadap komputer.
   * 1. **Pembatasan Masalah**

Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti mempunyai keterbatasan kemampuan dan berpikir secara menyeluruh maka dengan itu peneliti mencoba akan membatasi penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi bahasan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai efektivitas penerapan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

* 1. **Perumusan Masalah**

Dari penjelasan dalam identifikasi masalah maka penulis merumuskan masalah lebih fokus yaitu : seberapa besar tingkat efektivitas penerapan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerapan sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang

* 1. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari adanya penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Secara teoritis, antara lain :
2. Dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya
3. Dapat memperluas wawasan tentang sistem informasi khususnya mengenai sistem informasi administrasi kependudukan
4. Secara praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerapan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).
   1. **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

Pada Bab II memaparkan tentang deskripsi teori yang berhubungan dengan penelitian, kerangka berfikir yang menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori dan hipotesis penelitian yaitu jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada Bab III mengemukakan tentang metode penelitian, instrumen penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengolahan dan analisa data, serta tempat dan waktu dalam pelaksanaan penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dalam Bab IV memaparkan Deskripsi Objek Penelitian. Deskripsi Data yakni data mentah yang telah diolah menggunakan teknik analisis data yang relevan. Pengujian Persyaratan Statistik dengan menggunakan uji statistik tertentu. Pengujian Hipotesis. Intrepetasi Hasil Penelitian yakni penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis. Dan Pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB V PENUTUP**

Dalam Bab V yaitu Penutup, dipaparkan Simpulan dan Saran yang diungkapkan peneliti terkait dengan judul penelitian yang diangkat peneliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BAB II**

**DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

* 1. **Deskripsi Teori**

Efektivitas pada umumnya yaitu suatu tolak ukur dimana seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan atau sasarannya dengan tepat. Organisasi dapat mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang terdapat dalam organisasi itu sendiri. Efektivitas merupakan salah satu dari prinsip *good governance* yakni pemerintahan yang baik. Dengan tercapainya efektivitas dalam suatu organisasi maka organisasi tersebut dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Semakin besar kemajuan yang diperoleh ke arah tujuan, semakin efektif organisasi tersebut.

Penelitian mengenai SIAK termasuk ke dalam ranah ilmu administrasi negara karena SIAK merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang di buat untuk mempermudah petugas di jajaran instansi pemerintah khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan KTP dan KK. Penelitian ini mengenai efektivitas penerapan sistem informasi administrasi kependudukan untuk mengetahui seberapa efektif program SIAK diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang. Apabila SIAK dapat berjalan dengan efektif maka akan terwujud tertib administrasi kependudukan dan terciptanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional bagi penduduk agar tidak terjadi permasalahan seperti adanya KTP ganda.

* + 1. **Pengertian Efektivitas**

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*nya. Efektivitas harus dibedakan dengan efisiensi. Menurut Miller (dalam Tangkilisan, 2005:138), menjelaskan bahwa arti efektivitas dan efisien adalah sebagai berikut:

”Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan”.

Menurut Steers (dalam Halim, 2004:166) efektivitas adalah “seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai”. Efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Sementara itu menurut The Liang Gie (dalam Halim, 2004:167) berpendapat bahwa efektivitas adalah “suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya”.

Pendapat lain mengenai efektivitas menurut Robin (dalam Hermaya, 2004:7) adalah ”efektivitas sering digambarkan sebagai melakukan segala sesuatu yang benar yaitu aktivitas-aktivitas pekerjaan yang membantu organisasi mencapai sasaran”. Efektivitas menurut Gibson (1996:25) adalah “pencapaian sasaran yang telah disepakati atau usaha bersama. Bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan dengan meggunakan sumber daya yang terdapat dalam organisasi tersebut”. Sedangkan efektivitas menurut Georgopualos dan Tannebaum (dalam Tangkilisan, 2005:139) yaitu “efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya”.

Adapun kriteria atau indikator efektivitas itu sendiri dalam pengukuran efektivitas organisasi menurut Tangkilisan (2005:141) yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target

Maksud pencapaian target disini diartikan sejauhmana target dapat ditetapkan organisasi dapat terealisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauhmana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

1. Kemampuan adaptasi

Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauhmana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan luar organisasi.

1. Kepuasan kerja

Suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. Yang menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan atau sistem insentif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang berprestasi dan telah melakukan pekerjaan melebihi beban kerja yang ada.

1. Tanggungjawab

Organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya.

Efektivitas organisasi menurut Argris (dalam Tangkilisan, 2005:139) yaitu “keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia”. Menurut Sharma (dalam Tangkilisan, 2005:140) mengungkapkan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi, meliputi antara lain:

1. Produktivitas organisasi atau *output*
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi
3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.

Menurut Gibson (1996:49) efektivitas organisasi adalah “konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen”. Sedangkan menurut Ndraha (dalam Makmur, 2008:123) mengemukakan bahwa “efektivitas organisasi merupakan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan (target)”.

Pendapat lain menurut Etzioni (dalam Makmur, 2008:125) yaitu:

“Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Berdasarkan pendapat ini, efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya”.

Menurut Steers (dalam Makmur, 2008:124) mengemukakan bahwa “efektivitas itu sendiri paling baik dapat dimengerti jika dilihat dari sudut sejauh mana organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan tujuan operasional”. Selain itu menurut Winardi (2003:175) “efektivitas keorganisasian dapat dianggap sebagai alat pengukur kualitas hubungan sebuah organisasi dengan lingkungannya”.

Pengertian penerapan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005:1180) adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan; perihal mempraktikkan. Pendapat lain menurut McLeod (dalam Teguh, 2004:144) penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Sedangkan menurut Scoott (dalam Budiman, 2002:558) penerapan sistem adalah proses pemasangan sistem yang baru dirancang, termasuk semua perlengkapan dan perangkat lunak. Penerapan sistem sangat bergantung pada keterampilan teknis serta merupakan kegiatan yang sangat terstruktur.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan pengertian penerapan adalah melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu. Efektivitas merupakan batas-batas tingkat pencapaian tujuan organisasi. Konsep tingkat efektivitas organisasi menunjuk pada tingkat seberapa jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

Bila digabungkan efektivitas penerapan adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atau usaha bersama dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan tertentu. Dapat dikatakan bahwa efektivitas penerapan mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan atau sasaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.

* + 1. **Pengertian Sistem Informasi Manajemen**

Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat saat ini membawa pengaruh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Organisasi dipacu untuk mengolah datanya dengan cepat, lengkap, dan akurat menjadi suatu informasi yang digunakan sesuai dengan keperluan organisasi sendiri. Dibutuhkan suatu sistem informasi manajemen untuk mengolah dan mengelola informasi tersebut. Sistem informasi manajemen terdiri dari tiga kata yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Adapun pengertian dari sistem, informasi dan manajemen adalah sebagai berikut:

1. Sistem

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan (McLeod dalam Teguh, 2004:261).

1. Informasi

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang (Davis dalam Widyahartono, 2002:28).

1. Manajemen

Manajemen adalah proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain (Robbins dalam Hermaya, 2004:6).

Menurut Siagian (2002:15), ada delapan tahap penting dalam penanganan informasi, yaitu:

1. Penciptaan informasi

Informasi diperoleh dari data-data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

1. Pemeliharaan saluran informasi

Yang dimaksud dengan saluran informasi adalah media-media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Saluran informasi ini misalnya telepon, faksimile, komunikasi lisan, komunikasi tulisan, internet, dan sebagainya.

1. Transmisi informasi

Karena kebutuhan informasi yang berbeda-beda pada tiap unit kerja dalam suatu organisasi, maka berbagai informasi diseleksi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk kemudian disalurkan/ disebarkan ke berbagai unit kerja.

1. Penerimaan informasi

Kemampuan menyeleksi informasi tidak hanya dimiliki oleh penyalur/ pen-tranmisi informasi, tapi juga harus dimiliki oleh penerima informasi (pengguna informasi). Informasi yang dibutuhkan hanya benar-benar informasi yang relevan dengan tugas-tugasnya.

1. Penyimpanan informasi

Informasi yang telah terkumpul dan terolah dengan baik bisa menjadi sumber daya yang perlu disimpan dengan sebaik mungkin, karena tidak semua informasi langsung digunakan sebagaimana fungsinya.

1. Penelusuran informasi

Pencarian informasi yang telah disimpan sebelumnya untuk digunakan oleh pengguna.

1. Penggunaan informasi

Informasi sudah menyentuh seluruh segi kehidupan dan penghidupan, baik pada tingkat individual, tingkat kelompok, dan tingkat organisasi.

1. Penilaian kritis dan umpan balik.

Berhubungan dengan semua tahap yang telah disinggung di muka, diperlukan pula kegiatan penilaian yang kritis terhadap sistem informasi.

Informasi yang baik ialah informasi yang dapat memberikan manfaat pada saat yang tepat atau ketika dibutuhkan. Menurut Amsyah (1997:316) nilai informasi ditentukan oleh lima karakteristik, yaitu:

1. Ketelitian (*accuracy*), atau disebut juga akurasi dapat didefinisikan sebagai perbandingan dari informasi yang benar dengan jumlah seluruh informasi yang dihasilkan pada satu proses pengolahan data tertentu.
2. Ketepatan waktu (*timeliness*), artinya informasi cepat tersedia pada saat diperlukan. Jika suatu informasi itu akurat tapi diterima atau diketahuinya terlambat, tentu saja menjadi tidak berguna.
3. Kelengkapan (*complete*), informasi tidak hanya harus akurat dan tepat waktu, tapi juga harus lengkap agar tidak timbul simpang siur.
4. Keringkasan (*conciseness*), suatu informasi harus langsung mengenai sasaran yang diperlukan dan jelas.
5. Kesesuaian (*relevancy*), informasi hendaknya sesuai dengan keperluan pekerjaan atau keperluan manajemen. Informasi juga harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Jika salah satu dari lima karakteristik di atas tidak terdapat dalam suatu infomasi, maka informasi tersebut dapat dikatakan sebagai informasi yang kurang baik, karena menjadi tidak lengkap. Misalnya suatu informasi sudah diteliti, kemudian kelengkapannya pun sudah sesuai, ringkas sesuai dengan kebutuhan, tapi jika tidak tepat waktu ketika dibutuhkan, maka informasi tersebut akan menjadi tidak berguna.

Dari ruang lingkup diatas, definisi sebuah sistem informasi manajemen menurut Davis (dalam Widyahartono, 2002:3) adalah sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) komputer, produser pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah *data base*.
2. Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem informasi keorganisasian yang mendukung bukan hanya operasi tetapi juga mendukung proses-proses manajemen.
3. Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah konsep dan suatu orientasi ke arah mana menujunya sebuah rancangan sistem informasi, dan bukan merupakan suatu keadaan mutlak.

Menurut McLeod (dalam Teguh, 2007:11) sistem informasi manajemen adalah “sistem informasi manajemen (SIM) didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama”. Sedangkan menurut Kroenke (dalam Oetomo, 2002:168) “sistem informasi manajemen adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi-organisasi”.

Pendapat lain menurut Stoner (dalam Oetomo, 2002:168) yaitu:

“Sistem informasi manajemen merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, operasi secara efektif dan pengendalian”.

Sebuah sistem informasi manajemen bukanlah sekedar suatu perkembangan teknologis. SIM berhubungan dengan organisasi dan dengan manusia pengolahnya. Kemampuan manusia sebagai pengolah informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar rancangan mereka. Adapun sebuah sistem informasi manajemen mengandung elemen-elemen fisik menurut Davis (dalam Widyahartono, 1992:3) adalah sebagai berikut antara lain:

1. Perangkat keras komputer, terdiri atas komputer (pusat pengolah, unit masukan/keluaran, unit penyimpanan file) dan peralatan penyiapan data
2. Perangkat lunak komputer
   1. Sistem perangkat lunak umum, seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen data, yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer.
   2. Aplikasi perangkat lunak umum, seperti model analisis dan keputusan
   3. Program aplikasi yakni program yang secara spesifik dibuat untuk tiap aplikasi.
3. *Data Base* (data yang tersimpan dalam media penyimpanan komputer)
4. Prosedur, komponen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi.
5. Personalia pengoperasian, seperti operator komputer, analisis sistem, pembuat program, personalia penyiapan data dan pimpinan sistem informasi.

Menurut Nugroho (2008:16) dalam bukunya mendefinisikan “sistem informasi manajemen, disingkat SIM adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi mengelola informasi bagi manajemen organisasi. Di dalam organisasi, SIM berfungsi baik untuk pengolahan transaksi, manajemen kontrol maupun sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan”. Sedangkan Scott (dalam Budiman, 2002:69) berpendapat bahwa “SIM adalah sekumpulan sistem informasi yang saling berinteraksi yang memberikan informasi baik untuk kepentingan operasi atau kegiatan manajerial”.

Menurut Oetomo (2002:169) “SIM dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen (perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian dan pengendalian) dalam suatu organisasi”.

Semua sistem informasi memiliki tiga kegiatan utama, yaitu : mereka menerima data sebagai masukan (*input*); kemudian memprosesnya dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran akun (*up-dating account*), dan lain-lainnya; dan akhirnya memperoleh informasi sebagai keluarannya (*output*). Prinsip ini berlaku baik untuk sistem informasi manual, elektromekanis, maupun komputer. Ketiga fungsi ini tergambarkan pada sebuah sistem informasi sederhana dalam gambar 2.1 di bawah ini :

Data Informasi

Pemroses

Input Output

Gambar 2.1 Sebuah Sistem Informasi Sederhana

(Scott dalam Budiman, 2002:69)

Tujuan pembangunan SIM menurut Oetomo (2002:169) adalah untuk menyediakan informasi-informasi beserta ringkasan eksekutifnya yang akan menjadi landasan dalam melaksanakan proses manajerial. Dapat dikatakan tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah supaya organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun strategis. Sedangkan menurut Amsyah (1997:314), manfaat sistem informasi manajemen adalah untuk membantu memberi kejelasan dari sesuatu ketidakpastian atau untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, sehingga manusia dapat membuat suatu keputusan dengan kepastian yang lebih baik dan menguntungkan.

Dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Berarti, sebuah sistem bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara tak teratur, tetapi terdiri dari unsur yang dapat dikenal sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi karena satunya maksud, tujuan atau sasaran. Jadi, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang mendukung proses manajemen yang menghasilkan informasi yang berguna untuk suatu organisasi.

* + 1. **Pengertian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan merupakan pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan dengan menggunakan sitem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

Pengertian administrasi dan kependudukan itu sendiri, yaitu:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna (Siagian, 2001:2).
2. Kependudukan adalah [ilmu](http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu) yang mempelajari dinamika kependudukan [manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia). Meliputi di dalamnya ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan (id.wikipedia.org, 2010).

Menurut Oetomo (2002:11) sistem informasi didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi”. Sedangkan menurut Nugroho (2008:17) berpendapat bahwa “sistem informasi sebagai integrasi antara orang, data, alat dan prosedur yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, di dalam sistem informasi terdapat elemen orang, data, alat dan prosedur atau cara”.

Pengertian lain sistem informasi menurut Sutabri (2004:36) adalah:

“Suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat managerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan”.

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai.

Selain pengertian dari sistem informasi, pengertian administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dari ruang lingkup diatas, pengertian dari sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan (www.sitkessos.nad.go.id, 2009).

Pengertian lain dari sistem informasi administrasi kependudukan adalah:

“Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Sistem informasi ini akan menghasilkan database kependudukan yang lengkap, akurat, dan mutakhir” (Suwito, 2008).

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88 tahun 2004 tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, sistem informasi administrasi kependudukan adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.

Menurut Meliza (2009), SIAK adalah:

“Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dalam menyelenggarakan layanan kependudukan”.

Dalam implementasinya, SIAK menerapkan nomor induk kependudukan (NIK) yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, yang berlaku selamanya. Dalam SIAK, *database* antara kecamatan, kabupaten-kota, provinsi, dan Departemen Dalam Negeri akan terhubung dan terintegrasi. Seseorang tidak bisa memiliki identitas ganda dengan adanya nomor induk kependudukan. Sebab, nomor bersifat unik dan akan keluar secara otomatis ketika instansi pelaksana memasukkannya ke *database* kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa sistem informasi administrasi kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan”.

Sedangkan Mulya (2009) berpendapat bahwa:

“Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sebuah sistem informasi yang dibangun untuk mendukung proses administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dengan adanya sistem ini akan terwujud database kependudukan nasional secara bertahap”.

Sistem informasi administrasi kependudukan merupakan software yang memanajemen sistem informasi kependudukan dengan sistem komputerisasi dengan tingkat keamanan yang tinggi dan cermat (Erza, 2009). Selain itu, menurut Nugroho (2008:169) mengungkapkan bahwa “sistem informasi kependudukan digunakan untuk mengolah data kependudukan di lingkungan pemerintah daerah”.

Pendapat lain menurut Pratama (2009) adalah:

“Sistem informasi layanan administrasi kependudukan adalah sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai alat bantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dalam menyelenggarakan layanan kependudukan. Adapun layanan yang diberikan kepada masyarakat adalah penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperlukan oleh pemohon”.

Sistem informasi administrasi kependudukan ini dibuat untuk pekerjaan pendataan penduduk, dan khususnya untuk pengelolaan KTP dan KK (www.puslit.com, 2010). Manfaatnya adalah mempermudah penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan adanya sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dapat merealisasikan *database* penduduk. Dengan demikian pelayanan yang dihasilkan tidak hanya sebatas dapat merealisasikan pengumpulan *database* penduduk, tetapi sekaligus memberi nomor induk bagi setiap penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda (KTP ganda). Penyelenggaraan SIAK menggunakan kodifikasi wilayah administrasi pemerintahan, perangkat lunak, perangkat keras, formulir dan blangko dokumen penduduk yang dibakukan secara nasional yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi administrasi kependudukan merupakan suatu aplikasi yang dibuat untuk mempermudah para petugas instansi pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dibutuhkan oleh masyarakat.

* + 1. **Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Menurut Meliza (2009) tujuan dari sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), antara lain:

1. *Database* Kependudukan terpusat melalui pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan
2. *Database* Kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain (Statistik, Pajak, Imigrasi, dll)
3. Sistem SIAK terintegrasi (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, dll)
4. Standarisasi Nasional
   1. No. Pengenal Tunggal (NIK)
   2. Blangko Standar Nasional (KK, KTP, Buku, Register, Akta Capil)
   3. Formulir-formulir Standar Nasional (termasuk kodefikasinya),
5. Melindungi hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta-Akta Catatan Sipil) dengan mencantumkan NIK Nasional.

Tujuan sebuah pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) adalah:

1. Bagaimana komputerisasi itu dapat mengatasi jumlah data kependudukan yang besar, perhitungan-perhitungan dengan kecepatan perhitungan yang sangat cepat.
2. Untuk menjamin kontinuitas pekerjaan karena komputer tidak pernah lelah, tidak berubah kecepatannya.
3. Untuk mencapai kualitas penyimpanan data yang besar dan tahan lama.
4. Untuk kemudahan akses data dari pencarian, pengolahan, penyimpanan dan pengeditan data dapat dikelola dengan baik sehingga pencarian kembali menjadi sangat cepat dan mudah.
5. Pekerjaan yang rapi, konsisten, tidak berubah karena terprogram kecuali programnya yang berubah (www.puslit.com, 2010).

Manfaat lain dari sistem informasi administrasi kependudukan yang dikemukakan menurut Meliza (2009) adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya tertib administratif kependudukan, karena dengan adanya NIK maka permasalahan seperti KTP ganda tidak akan terjadi
2. Tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam layanan publik *(short time response)*, sehingga masyarakat tidak perlu repot harus bolak-balik untuk mengurus kepentingan mereka.
3. Terbangunnya landasan bagi pengembangan sistem di masa yang akan datang menuju integrasi secara menyeluruh yang diharapkan dapat diterapkan di semua provinsi di Indonesia secepatnya.
4. Tercapainya *Good Corporate Governance* dalam *public services* di Dinas Kependudukan, dimana biasanya masyarakat selalu beranggapan membuat KTP/KK itu susah karena harus bolak-balik dan ada biayanya yang mahal.
5. Untuk menyediakan data individu penduduk (mikro) dan data agregat (makro) penduduk. Penyediaan data tersebut melalui pengembangan SIAK dengan membangun Bank Data kependudukan Nasional yang dapat menyajikan berbagai profil kependudukan untuk kepentingan individu, masyarakat, pemerintah dan kepentingan pembangunan lainnya
6. Untuk pengolahan data statistik vital baik yang berhubungan dengan peristiwa penting (lahir, mati, kawin, cerai dan lain-lain) maupun peristiwa kependududukan (perubahan alamat, pindah datang dan perpanjangan KTP). Hasil penghitungan dan pengolahan data statistik tersebut sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi para penyelenggara dan pelaksana pembangunan serta kepentingan pembangunan lainnya.

Sistem perangkat lunak ini yakni SIAK itu sendiri berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah dalam penyampaian informasi kepada masyarakat serta mempermudah kemudahan dalam pembuatan KTP dan KK. Sistem informasi administrasi kependudukan memiliki peran di dalam administrasi kependudukan, menurut Meliza (2009) ada empat peran SIAK dalam administrasi kependudukan yaitu:

1. Perekaman, pengiriman dan pengolahan data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Penerbitan NIK Nasional
3. Memfasilitasi validasi dan verifikasi individu penduduk untuk pelayanan publik lainnya
4. Penyajian data dan informasi yang mutakhir bagi instansi terkait dalam rangka perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program Pemerintah.
   * 1. **Kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Adapun kegiatan yang dilakukan sistem informasi administrasi kependudukan adalah pelayanan kartu tanda penduduk dan pelayanan kartu keluarga (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, 2009). Ada beberapa dasar hukum yang melandasi pelaksanaan SIAK diantaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya (www.disdukcapil-serang.com, 2009).

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan menggunakan SIAK dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang sudah menerapkan SIAK, SIAK yang dipakai oleh Kabupaten Serang sendiri menggunakan SIAK *online*, akan tetapi hanya empat kecamatan yang sudah *online* dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, sedangkan kecamatan lainnya yang tidak *online* datang langsung ke Dinas Kependudukan untuk penerbitan KTP dan KK yang diwakili oleh pegawai kecamatan atau operator SIAK di setiap Kecamatan.

Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan melalui SIAK baru sebatas pelayanan KTP ataipun KK di empat kecamatan. Sistem yang dibangun *online* antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan keempat Kecamatan menggunakan *tower*, *router* dan *LAN Card*. Menurut Nugroho (2008:38) mendefinisikan pengertian *router* adalah sebuah komputer yang difungsikan untuk menghubungkan banyak LAN yang sejenis. Melalui *router*, data dapat dikirim melalui beberapa alternatif jalan. Dengan demikian, bila sebuah jalan putus, *router* dapat mencarikan saluran lain untuk mengirim data. *Client-Server* merupakan satu atau lebih komputer yang bertindak sebagai *server* dan beberapa komputer yang bertindak sebagai *client* (Nugroho, 2008:43). Pengertian-pengertian lain dari beberapa teknologi yang digunakan atau yang berhubungan dengan sistem informasi administrasi kependudukan seperti s*erver*, basis data *(database),* jaringan komputer, *Local Area Network* (LAN) dan *Ethernet.* Adapun definisinya adalah sebagai berikut:

1. *Server*

Adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.

1. Basis Data *(database)*

Yaitu kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

1. Jaringan Komputer

Adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama.

1. *Local Area Network* (LAN)

Yaitu jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil.

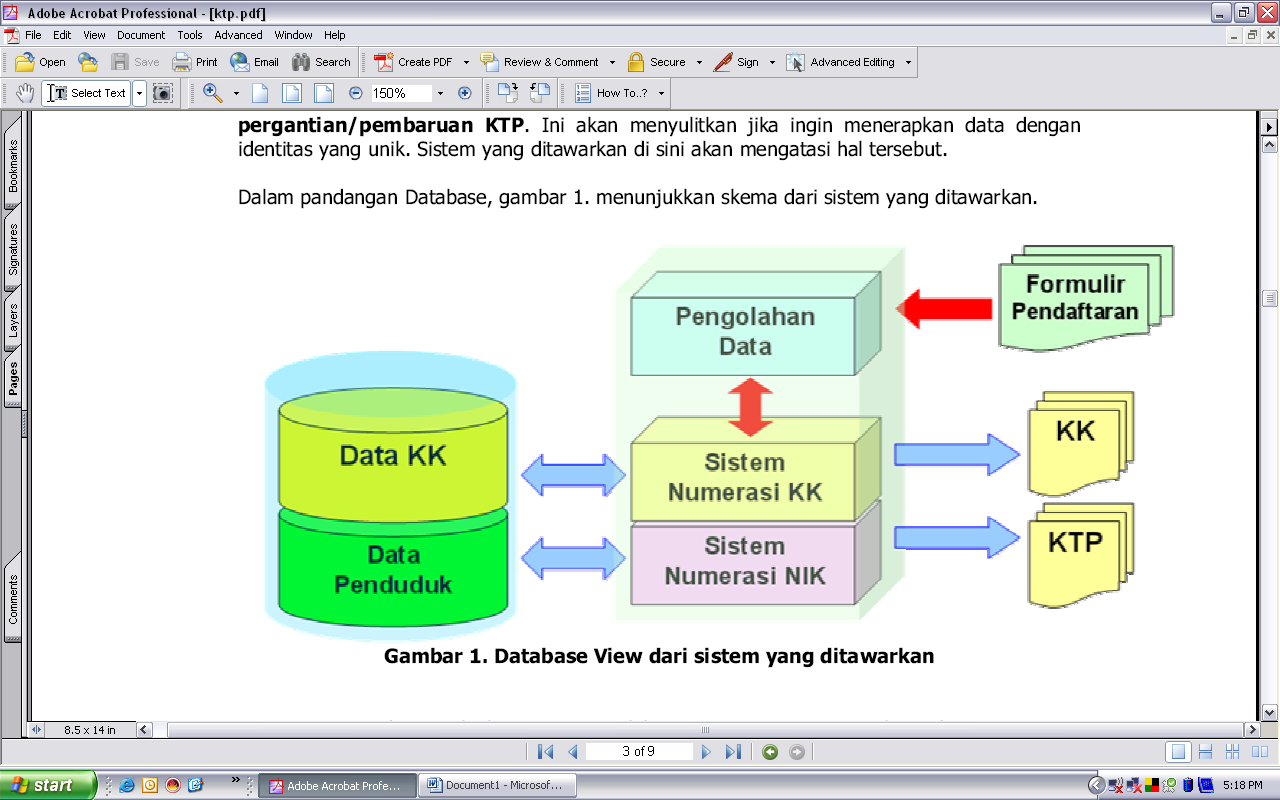
1. *Ethernet*

Adalah jenis skenario perkabelan dan pemprosesan sinyal untuk data jaringan komputer (Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, 2008).

* + 1. **Modul Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) terdapat beberapa modul, yaitu:

1. Modul Registrasi Kependudukan, modul untuk melakukan *input* data kependudukan.
2. Modul Tampil Data, modul untuk menampilkan data yang telah tersimpan dalam *Database*.
3. Modul Cari Data, modul untuk mencari data yang telah disimpan dalam *Database*. Pencarian dapat dilakukan dengan beberapa kriteria.
4. Modul Hitung Otomatis, modul untuk mengotomatiskan perhitungan biaya layanan kependudukan sehingga menghilangkan biaya siluman dan kesalahan perhitungan biaya.
5. Modul Laporan, modul untuk menampilkan laporan yang dibutuhkan instansi terkait. Laporan dapat dibuat per periodik atau per layanan. Laporan bisa berupa teks atau Grafik.
6. Modul *Security*/Keamanan, fitur security/hak akses yang berbeda untuk setiap *UserID* menurut tugas, tanggung jawab dan wewenangnya yang berguna untuk Menjaga keamanan data dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Melakukan otorisasi untuk setiap transaksi yang dimasukkan ke dalam sistem dan mencegah orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sistem.
7. Modul Cetak, modul untuk mencetak Bukti Registrasi, Tagihan (Surat Ketetapan Retribusi), Kwitansi (Surat Setoran Retribusi) dan dokumen Surat Izin/Akta ([www.barmaindo](http://www.barmaindo).com, 2006).
   * 1. **Sistem Pengolahan Data**
        1. **Sistem Pengolahan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

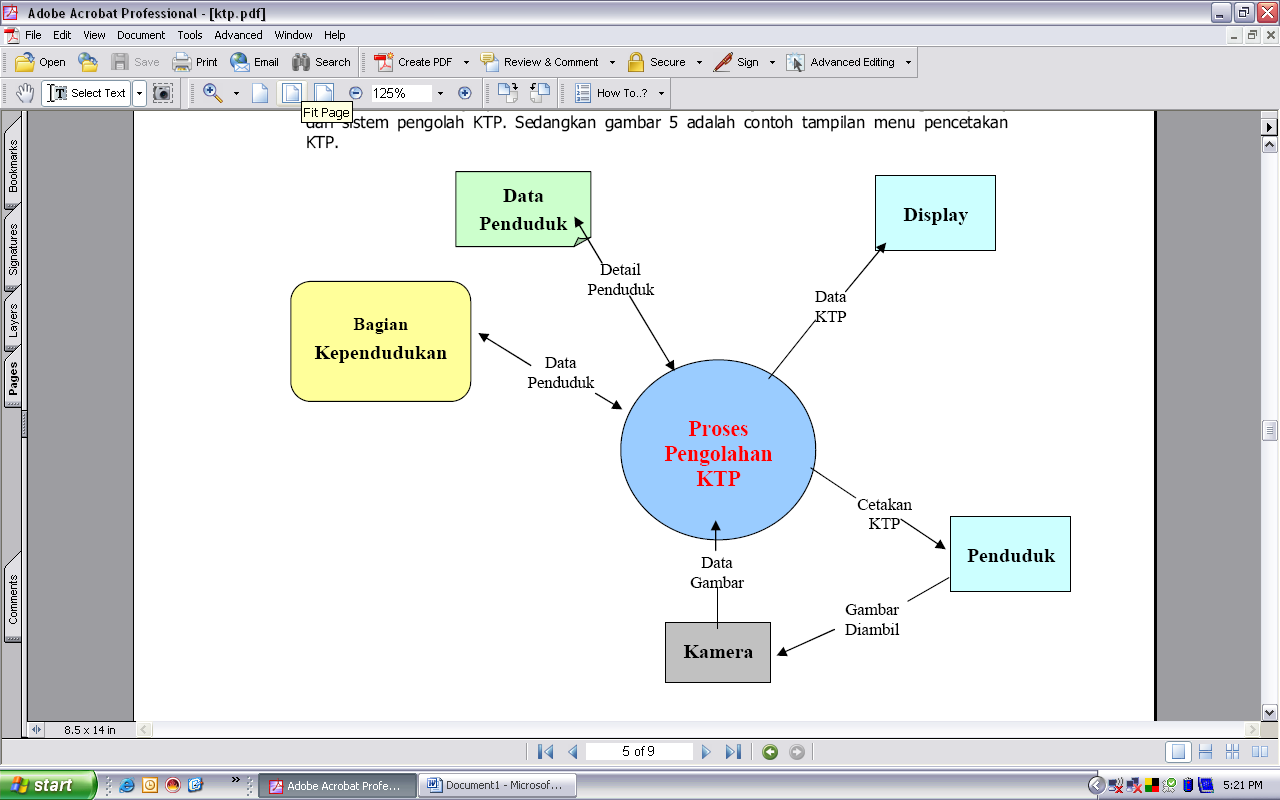


Gambar 2.2 *Database View*

*Sumber :* [*www.puslit.com*](http://www.puslit.com)*, 2010*

Dengan sistem di atas, baik sistem pengolah KK atau KTP mengakses data yang sama untuk menjamin kesesuaian data. *Database* penduduk diletakkan di komputer yang berbeda dengan komputer untuk pengolahan data penduduk. Akan tetapi komputer untuk pengolahan data terhubungan dengan komputer *database* melalui jaringan.

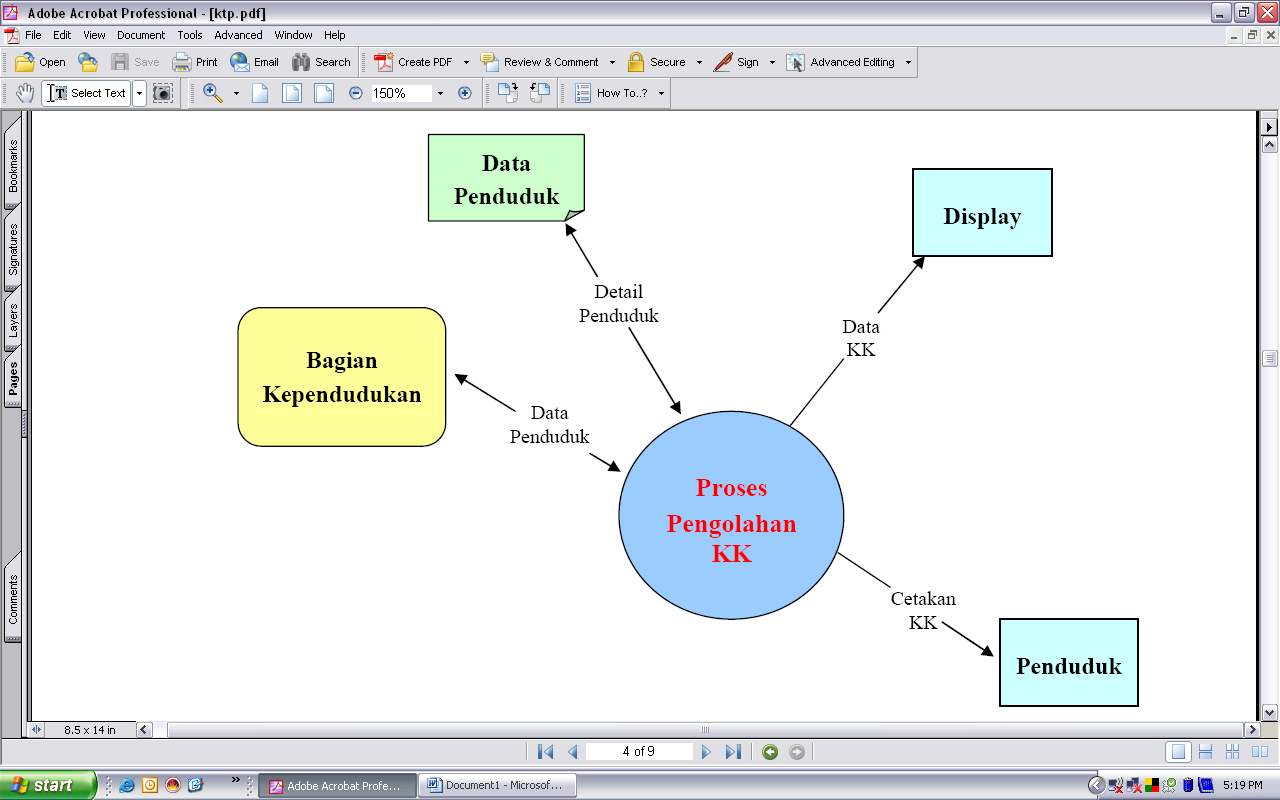
Sistem pengolah KTP seperti gambar 2.3 dibawah ini, dengan adanya sistem pengolahan data yang seperti ini maka akan mempermudah dalam proses pekerjaan, karena dapat menghasilkan pekerjaan menjadi rapi, konsisten, tidak berubah karena terprogram kecuali jika programnya yang berubah. Selain itu untuk kemudahan akses data mulai dari pencarian, pengolahan, penyimpanan dan pengeditan data dapat dikelola dengan baik sehingga pencarian kembali menjadi sangat cepat dan mudah.



Gambar 2.3 Sistem Pengolah KTP

*Sumber : www.puslit.com, 2010*

* + - 1. **Sistem Pengolahan Kartu Keluarga (KK)**



Gambar 2.4 Sistem Pengolah KK

*Sumber : www.puslit.com, 2010*

Sistem pengolah KK dapat mempermudah dalam proses pekerjaan, dimana data di*manage* sedemikian sehingga sangat fleksibel dalam penambahan, perubahan, penghapusan data penduduk secara utuh maupun sebagian data dari satu penduduk. Pengunaan teknologi informasi dalam pelayanan urusan administrasi kependudukan yang berupa program komputerisasi menjadi syarat yang tidak dapat dihindari untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan dan pembangunan NIK tunggal bagi setiap penduduk. Dukungan aplikasi SIAK/program komputer sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas sehari-hari instansi pelaksana dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan. Oleh karena itu sistem komputerisasi sangat dibutuhkan dalam pengolahan data. Komputerisasi dapat menyimpan data yang besar dan tahan lama, serta dapat mengatasi jumlah data kependudukan yang besar, karena komputer tidak pernah lelah.

* + 1. **Tipe Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK)**

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di kabupaten/kota, kecamatan atau kelurahan untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan. Untuk skema infrastruktur di daerah dibedakan menjadi beberapa katagori, yaitu Tipe A (Kab/Kota dan Kec *Online*), Tipe B (Kab/Kota *online* dan Kec *offline*), dan Tipe C (Kab/Kota dan Kec *offline*). Untuk masing-masing tipe, skema arsitektur secara logik diperlihatkan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.5 Skema TPDK Tipe A

Sumber : [Hasibuan](http://www.cs.ui.ac.id), 2007

Pada Gambar 2.5 diatas, TPDK yang berada di Kabupaten/Kota dan juga Kecamatan memiliki koneksi *online* dengan pusat *datacenter* di Jakarta. Koneksi jaringan yang dipakai antara simpul adalah *VPN Dial Up*.



Gambar 2.6 Skema TPDK Tipe B

Sumber : [Hasibuan](http://www.cs.ui.ac.id), 2007

Pada Gambar 2.6 diatas, Kabupaten/Kota *online* terhadap *datacenter* sedangkan Kecamatan *offline*. Untuk tetap dapat menggunakan SIAK, Kecamatan melakukan transaksi dan disimpan dalam bentuk file di Kecamatan. Setelah itu, Kecamatan mengirimkan media perekam data yang berisi file data hasil transaksi ke Kabupaten/Kota yang telah *online*. File tersebut kemudian akan disimpan dalam bentuk *database* yang terletak di Kabupaten/Kota. Dengan data ini, Kabupaten/Kota akan meng-*upload*/meng-*update* data Kecamatan tersebut secara *online* ke *database* yang berada di *datacenter*. Media penyimpanan kemudian dapat dikembalikan ke Kecamatan. Frekuensi pengiriman media penyimpanan antara kecamatan ke Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan.



Gambar 2.7 Skema TPDK Tipe C

Sumber : [Hasibuan](http://www.cs.ui.ac.id), 2007

Pada Gambar 2.7 diatas, Kecamatan dan Kabupaten/Kota *offline*. Sedangkan Propinsi *online*. Pada tipe ini pengiriman media penyimpanan dari Kecamatan ke Kabupaten/Kota dan sebaliknya maupun dari Kabupaten/Kota ke Propinsi dan sebaliknya dilakukan secara manual. Transaksi yang dilakukan di Kecamatan akan disimpan dulu dalam bentuk file tertentu. File ini akan disimpan dalam media penyimpanan (CD, hardisk, dll) dan kemudian dikirimkan ke Kabupaten. Di Kabupaten, file tersebut akan di *input* ke dalam *database* Kabupaten. Setelah diinput kedalam *database* lokal, hasil *updating* tersebut kemudian di-*backup* dalam bentuk *script database* dan disimpan kedalam media penyimpanan. Media penyimpanan akan dikirimkan secara manual ke Propinsi. Setelah menerima media penyimpanan, Propinsi akan meng-*upload* data yang tersimpan dalam media ke dalam *database* Propinsi. Setelah tersimpan dalam *database* propinsi, data di-*upload online* ke *datacenter*.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk koneksi data dengan pemerintah pusat, SIAK Kabupaten Serang sementara masih *offline* (tidak tersambung secara langsung dengan pusat data Depdagri). Selain itu keterbatasan anggaran yang dimiliki ataupun kemampuan daerah yang terbatas hanya empat Kecamatan yang *online* dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai TPDK Kabupaten Serang. SIAK yang menghubungkan kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah SIAK *online*.

Menurut Hasibuan (2007), SIAK *Online* atau sistem informasi administrasi kependudukan *online* adalah sistem informasi atau aplikasi yang ditujukan untuk memfasilitasi pelayanan bidang administrasi kependudukan. SIAK *Online* didesain sebagai aplikasi terpusat (*centralized application*) yang akan diakses dari TPDK (Tempat Perekaman Data Penduduk) yang direncanakan berbasis di Kecamatan di seluruh Indonesia. SIAK *online* berfungsi sebagai perekam dan pencetak data penduduk dan juga berfungsi sebagai buku laporan. SIAK *Online* dibangun menggunakan teknologi J2EE atau *Java 2 Enterprise Edition* yang luas penggunaannya dan mudah untuk di integrasikan (dikembangkan). *Database server* yang digunakan adalah *Oracle Server 9i*. Sedangkan *Application server* yang digunakan adalah *Bea Web Logic Server 8.2*.

* + 1. **Keamanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Aspek keamanan *(security)* merupakan salah satu aspek yang sering dipertanyakan dalam implementasi sebuah sistem informasi. Apalagi sistem yang akan dikembangkan di Adminduk memiliki data yang sangat sensitif. Untuk itu masalah keamanan perlu mendapat perhatian yang khusus. Menurut Hasibuan (2007) fitur keamanan yang akan diterapkan pada SIAK terdistribusi terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan fungsinya:

1. *Network security*: fokus kepada media pembawa informasi/data, seperti jaringan komputer;
2. *Computer security*: fokus kepada komputer (*server*, *workstation*, terminal), termasuk di dalamnya masalah yang berhubungan dengan *operating system*; dan
3. *Application security*: fokus kepada program aplikasi (*software*) dan *database*.

Dari sudut pandang yang lain, fitur keamanan yang akan diterapkan pada SIAK terdistribusi terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Keamanan yang bersifat fisik;
2. Keamanan yang berhubungan dengan orang;
3. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi;
4. Keamanan dalam kebijakan dan prosedur dalam operasi (Hasibuan, 2007).
   1. **Kerangka Berfikir**

Sistem informasi merupakan suatu sistem atau pengetahuan untuk para pengguna informasi. Pentingnya suatu sistem informasi disebabkan keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna informasi itu sendiri. Kabupaten Serang adalah salah satu Kabupaten yang didalammya terdapat banyak informasi baik informasi untuk publik maupun informasi untuk para pengguna informasi lainnya. Terkait hal tersebut, di Kabupaten Serang terdapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan informasi mengenai kependudukan serta pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi yang diperuntukkan untuk penerbitan KTP dan KK yang disebut dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

Program SIAK ini adalah salah satu program prioritas dari pemerintah kabupaten serang yang  bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal, berupa NIK, bagi seluruh penduduk indonesia,   sehingga data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem ini akan menghasilkan data penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir.

Adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan konstribusi positif terhadap masalah kependudukan. Efektivitas penerapan sistem informasi administrasi kependudukan untuk melihat apakah penerapan sistem informasi administrasi kependudukan telah efektif atau belum, karena akan berpengaruh pada tercapainya tertib administrasi kependudukan.

Untuk menjelaskan sejauhmana efektivitas penerapan sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, yang didalamnya masih terdapat kendala yaitu diantaranya, keterbatasan anggaran untuk memasang peralatan komunikasi agar seluruh Kecamatan di Kabupaten Serang dapat *online* dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, kurangnya sarana yang menunjang kelancaran sistem informasi administrasi kependudukan, kurangnya tanggungjawab pegawai atau operator SIAK di dalam memenuhi perlengkapan pembuatan KTP dan KK yang termasuk ke dalam kegiatan SIAK, serta kualitas sumber daya manusia dalam hal ini para pegawai yang memiliki memampuan teknisi relatif terbatas dalam pemahaman terhadap komputer, maka peneliti akan menggunakan indikator efektivitas menurut Tangkilisan (Pencapaian target, kemampuan adaptasi, kepuasaan kerja, tanggung jawab) dan indikator dari teori sistem informasi manajemen menurut Davis (*hardware*, *software*, *database*, prosedur, personalia pengoperasian).

Peneliti menggunakan teori efektivitas dari Tangkilisan dan teori sistem informasi manajemen dari Davis karena terdapat keterkaitan antara masalah yang ada dengan teori yang akan digunakan untuk penelitian ini ataupun dapat dikatakan teori digunakan untuk dapat menjawab permasalahan. Berikut ini akan ditunjukkan alur berpikir peneliti dalam melakukan penelitian.

GAMBAR 2.8

KERANGKA BERFIKIR

Permasalahan penerapan SIAK yaitu:

1. Keterbatasan anggaran
2. Kurangnya sarana
3. Kurangnya tanggungjawab pegawai atau operator SIAK
4. Sumber daya manusia yakni teknisi yang terbatas

***Feedback***

1. Dapat menciptakan penerapan SIAK yang efektif
2. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan
3. Terciptanya NIK Nasional
4. Berkurangnya permasalahan mengenai KTP ganda

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang

Efektivitas, indikatornya antara lain:

1. Pencapaian target dalam pencapaian tujuan organisasi
2. Kemampuan adaptasi menyesuaikan diri internal dan eksternal organisasi
3. Kepuasan kerja dalam melaksanakan pekerjaan
4. Tanggungjawab dalam suatu organisasi (Tangkilisan, 2005:141)
5. Perangkat keras komputer berupa komputer dan *network*
6. Perangkat lunak komputer berupa aplikasi dan program
7. *Database* berupa media penyimpanan data dalam suatu komputer
8. Prosedur dalam suatu organisasi
9. Personalia pengoperasian berupa operator dan teknisi komputer (Davis, 1992:3).

* 1. **Hipotesis Penelitian**

Perumusan Hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti (Sarwono, 2006:65). Ataupun dapat dikatakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2002:64). Hipotesis adalah jawaban sementara dari peneliti terhadap pertanyaan penelitiannya sendiri, hipotesis harus diuji (bukan dibuktikan) kebenaran atau ketidakbenarannya (Irawan, 2006:140). Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektivitas penerapan sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, dimana peneliti memprediksikan hipotesis tersebut maksimal sebesar 70% dari nilai ideal yaitu 100%, dengan penjelasan sebagai berikut:

**Ho** : untuk memprediksikan lebih rendah atau sama dengan 70%

**Ha** : untuk memprediksikan lebih tinggi dari 70%

**BAB III**

**METODOLOGI PENELITIAN**

* 1. **Metode Penelitian**

Metodologi adalah totalitas cara ilmiah untuk menemukan kebenaran ilmiah (Irawan, 2006:147). Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:2). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dengan tujuan utama yakni menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat (Sukardi, 2007:157). Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang menjelaskan nilai suatu variabel dengan mengolah data-data yang ada ke dalam satuan angka.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi, kemudian mengangkat ke permukaan mengenai gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut (Bungin, 2009:36). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai efektivitas penerapan sistem informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

* 1. **Instrumen Penelitian**

Meneliti adalah melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial maupun alam. Karena merupakan suatu kegiatan pengukuran, maka dalam penelitian harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan Instrumen Penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti akan menggunakan teknik untuk mengumpulkan data, teknik tersebut antara lain:

1. Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko dan Achmadi, 2005:70). Dalam penelitian ini pengamatan/observasi yang dilakukan adalah nonpartisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen serta termasuk ke dalam observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya (Sugiyono, 2008:146). Observasi pada penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.
2. Kuesioner berisikan pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan akan diberikan kepada sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2008:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dan kuesioner dalam penelitian ini akan diberikan pada pegawai di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dan operator-operator SIAK di setiap Kecamatan di Kabupaten Serang.
3. Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden (Jogiyanto, 2008:111). Wawancara yang peneliti lakukan berupa wawancara personal yaitu wawancara dengan melakukan tatap muka langsung dengan responden (Jogiyanto, 2008:112). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas atau bersifat insidental. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara ini dilakukan pada pegawai atau operator serta teknisi SIAK. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada masyarakat penerima jasa pengguna SIAK.
4. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data diperoleh melalui pengumpulan peraturan, undang-undang, laporan-laporan, catatan serta dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah penelitian ini. Menurut Soehartono (2004:70) studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.
5. Studi kepustakaan atau studi literatur yaitu pengumpulan data diperoleh dari berbagai referensi yang relevan mengenai penelitian ini berdasarkan teks books maupun jurnal ilmiah.

Adapun instrumen untuk mengukur efektivitas penerapan sistem informasi administrasi kependudukan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini yaitu sebagai berikut:

TABEL 3.1

INSTRUMEN PENELITIAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Indikator** | **Sub Indikator** | **No. Item** |
| Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) | 1. Pencapaian Target | * 1. Pelaksanaan tujuan organisasi   2. Pencapaian tujuan | 1, 2  3, 4 |
| 1. Kemampuan Beradaptasi | 1. Penyesuaian diri internal organisasi 2. Penyesuaian diri eksternal organisasi | 5, 6  7, 8 |
| 1. Kepuasan Kerja | 1. Motivasi Pekerjaan 2. Kenyamanan 3. Sistem insentif | 9, 10  11, 12  13, 14 |
| 1. Tanggungjawab | 1. Kemampuan menyelesaikan mandat 2. Kemampuan menyelesaikan masalah | 15, 16, 17  18, 19 |
| 1. Perangkat Keras *(Hardware)* | * 1. Komputer   2. Jaringan | 20, 21  22, 23  24, 25 |
| 1. Perangkat Lunak *(Software)* | 1. Aplikasi perangkat lunak 2. Program perangkat lunak | 26, 27  28, 29 |
| 1. *Database* | 1. Media penyimpanan data | 30, 31, 32 |
| 1. Prosedur | * + 1. Aturan Hukum     2. Prosedur | 33  34, 35 |
| 1. Personalia Pengoperasian | 1. Operator komputer 2. Teknisi komputer | 36, 37, 38  39, 40 |

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel. Sedangkan skala pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala *Likert*. Skala ini terdiri atas sejumlah pernyataan yang semuanya menunjukkan sikap terhadap suatu objek tertentu atau menunjukkan ciri tertentu yang akan diukur (Soehartono, 2004:77). Skala likert ini digunakan oleh peneliti guna mengukur persepsi atau sikap seseorang, menilai sikap atau tingkah laku dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden. Responden dianjurkan untuk memilih kategori jawaban yang telah diatur oleh peneliti yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju (Sukardi, 2007:146).

Indikator variabel yang disusun melalui item-item instrumen dalam bentuk pernyataan diberikan jawaban setiap item instrumennya. Jawaban setiap item diberi skor, seperti berikut ini:

TABEL 3.2

SKOR DALAM PENELITIAN

|  |  |
| --- | --- |
| **Skor Pernyataan** | **Keterangan** |
| 4 | Sangat Setuju (SS) |
| 3 | Setuju (S) |
| 2 | Kurang Setuju (KS) |
| 1 | Tidak Setuju (TS) |

(Sukardi, 2007:147)

* 1. **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelopori dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:80). Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karateristik tertentu dalam suatu penelitian (Nawawi, 2005:141). Pendapat lain menurut Irawan (2006:237) bahwa populasi merupakan keseluruhan (total) elemen (objek) yang akan dijelaskan peneliti melalui penelitiannya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 37 orang yang terdiri dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang di bidang pengelolaan informasi admnistrasi kependudukan sebanyak 9 orang serta operator-operator SIAK di 28 Kecamatan di Kabupaten Serang dimana setiap Kecamatan terdiri dari satu orang operator SIAK jadi operator-operator SIAK di 28 Kecamatan sebanyak 28 orang.

Menurut Nawawi (2005:144) sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Menurut Irawan (2006:239) sampel yang baik adalah sampel yang mampu mewakili populasi secara maksimal.

Teknik Sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah sampel yang sama jumlahnya dengan populasinya (Irawan, 2006:231). Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2008:85). Hal ini dilakukan karena jumlah populasi yang relatif kecil. Agar sampel yang diambil bersifat representatif, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 37 orang.

* 1. **Teknik Pengolahan dan Analisa Data**
     1. **Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data merupakan tahapan dimana data dipersiapkan, diklasifikasi, dan di format menurut aturan tertentu untuk keperluan proses berikutnya yaitu analisis data. Data yang telah terkumpul diolah dengan melalui beberapa proses berikut ini :

1. *Editing*

Yaitu tahap memeriksa dimana data yang dikumpulkan melalui kuesioner sebelum diolah perlu diperiksa lebih dahulu kebenarannya (Adi, 2004:118). Tujuan dari editing itu sendiri adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Menurut Irawan (2006:180) editing data mengacu pada kegiatan persiapan data sebelum dianalisis.

1. *Coding*

Adalah tahap proses pemberian identitas, yakni mengklasifikasi data-data, data yang telah diedit diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis (Bungin, 2005:166).

1. *Tabulating*

Adalah tahap pekerjaan membuat tabel. Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukkan dalam tabel (Narbuko dan Achmadi, 2005: 155). Pendapat lain menurut Irawan (2006:182) jika data telah selesai diedit dakn dikoding maka data siap untuk ditabulasikan.

* + 1. **Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2008:147). Analisis data adalah proses yang dimulai dari pengolahan data sampai data siap diinterprestasikan dan disimpulkan. Tujuan analisis data adalah untuk meringkas data dan menemukan pola kuantitatif yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian (Irawan, 2006:144). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Metode analisis kuantitatif yaitu metode analisis terhadap data-data berbentuk angka-angka dengan cara perhitungan secara statistik.

* + - 1. **Uji Validitas**

Instrumen yang baik memenuhi dua syarat yaitu reliabel dan valid. Instrumen dikatakan valid bila mampu mengukur secara akurat objek yang diukur (Irawan, 2006:159). Uji Validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur (Sukardi, 2007:121). Menurut Sugiyono (2008:121) instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Sedangkan menurut Arikunto (2002:144) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Menurut Sugiyono (2008:183) rumus uji validitas adalah sebagai berikut:



Keterangan:

*r* = Koefisien korelasi *product moment*

∑ X = Jumlah skor dalam sebaran X

∑ Y = Jumlah skor total

∑ XY = Jumlah hasil kali skor X dan skor total yang berpasangan

∑ X2 = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X

∑ Y2 = Jumlah skor total yang dikuadratkan

*n* = Jumlah sampel

* + - 1. **Uji Reliabilitas**

Menurut Purwanto (2007:161) reliabilitas berasal dari kata *rely* bahasa inggris, yang memiliki arti percaya, dan *reliable* artinya dapat dipercaya. Jadi reliabilitas dapat diartikan sebagai keterpercayaan. Reliabilitas sama dengan konsistensi atau keajekan (Sukardi, 2007: 127). Reliabilitas merupakan sifat reliable, ajeg, konsisten. Instrumen yang baik adalah reliable yakni menghasilkan data yang konsisten, ajeg dari waktu ke waktu (Irawan, 2006:239). Pendapat lain menurut Bungin (2005:96) reliabilitas alat ukur adalah kesesuaian alat ukur dengan yang diukur, sehingga alat ukur itu dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Sedangkan menurut Arikunto (2002:154) instrument yang sudah dapat dipercaya, yang *reliable* akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach* yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Suatu variabel dikatakann reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0,30 (Purwanto, 2007:181). Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang benar-benar tepat, akurat dan mantap. Apabila koefisien reliabilitas instrument dihasilkan lebih besar berarti instrumen tersebut memiliki reliabiliatas yang cukup baik. Menurut Purwanto (2007:181) rumus *Alpha Cronbach* adalah sebagai berikut:

n ∑Si2

r11 = [ ][1- ]

( n - 1) ∑St2

Keterangan:

n = Jumlah butir

Si2 = Variasi butir

St2 = Variasi total

* + - 1. **Uji Normalitas Data**

Uji normalitas merupakan pengujian data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji normalitas dengan menggunakan uji grafik dapat digunakan dengan melihat grafik normal probability plot, yaitu deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas (Umar, 2009:181).

* + - 1. **Uji t-test**

Untuk menganalisis efektivitas penerapan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang maka dalam menguji hipotesis deskriptif ini menggunakan uji t-test satu sampel, dengan rumus (Sugiyono, 2008:178):



Keterangan :

t = nilai t yang dihitung

 = nilai rata – rata

μo = nilai yang dihipotesiskan

s = simpangan baku sampel

n = jumlah anggota sampel

* 1. **Tempat dan Waktu**
     1. **Tempat**

Adapun lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang beralamat di Jalan Raya Cilegon Km.02 No.22 Telp/Fax (0254) 203751, (0254) 212160 Serang Banten serta empat kecamatan yang *online* dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang yaitu Kecamatan Baros, Kramatwatu, Cikande dan Kragilan.

* + 1. **Waktu**

Adapun jadwal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3

JADWAL PENELITIAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Tahun 2009-2010** | | | | | | | | | | |
| **Nov** | **Des** | **Jan** | **Feb** | **Maret** | **April** | **Mei** | **Juni** | **Juli** | **Agust** | **Sept** |
| Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perizinan dan Observasi Awal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengumpulan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sidang Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisi Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengumpulan Data ke Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Hasil Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sidang Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisi Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |